

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan ini diperlukan strategi yang tepat agar tercapai pemerataan perekonomian sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

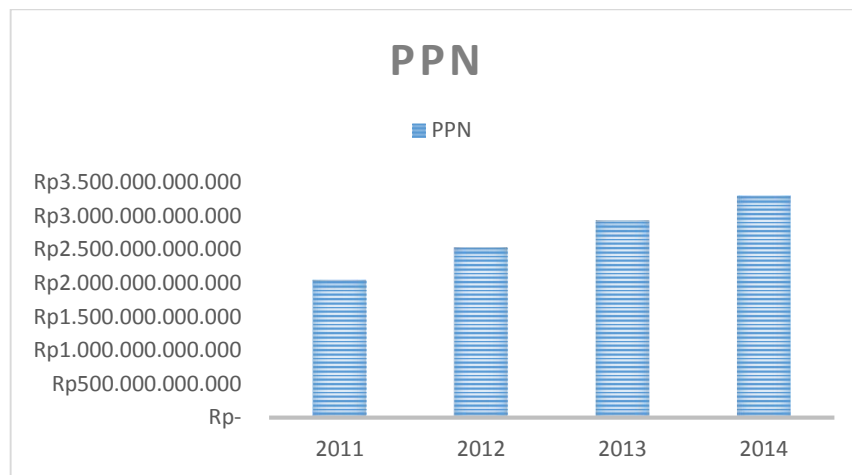
Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap usaha pembangunan akan selalu membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan diupayakan agar terus menerus meningkat seiring dengan laju perkembangan pembangunan. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak adalah alat anggaran yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang senantiasa dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung secara cepat di dalam masyarakat melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah departemen keuangan yang salah satu fungsinya adalah membuat dan melaksanakan kebijakan fiskal. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi masyarakat, karena semakin baik kondisi perekonomian maka akan semakin banyak penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat. Penghasilan tersebut akan digunakan untuk keperluan konsumsi barang dan jasa yang akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai provinsi terluas di Sumatera, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya dengan potensi perpajakan. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan negara dari sisi pajak. Penerimaan PPN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dari tahun 2011 sebesar Rp 2 triliun hingga tahun 2014 sebesar Rp 3,2 triliun. Penerimaan PPN di Sumsel dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada gambar 1.1.

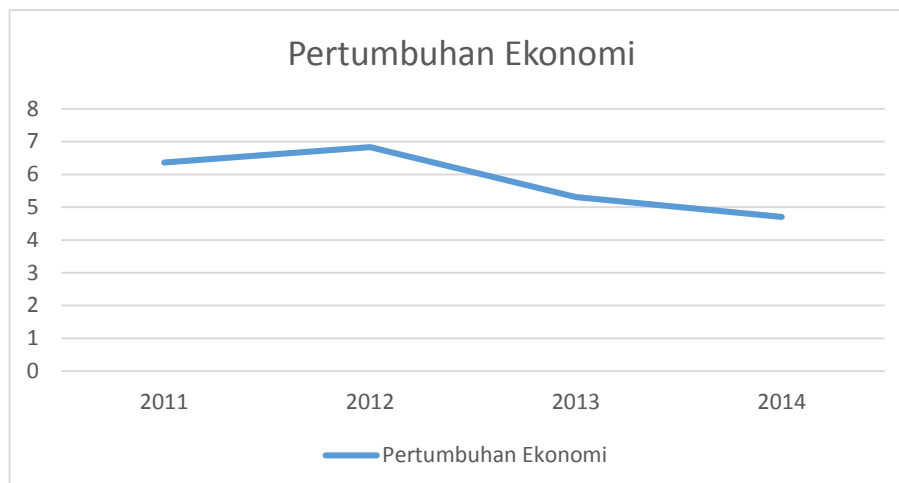


Sumber : Data diolah dari DJP Kanwil Sumsel & Babel

**Gambar 1.1**  
**Penerimaan PPN Tahun 2011-2014**

Kegiatan perekonomian secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan atau penghasilan yang kemudian akan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi.

Sebagai gambaran, selama periode tahun 2011-2014 pertumbuhan ekonomi Sumsel mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 6,4% pada tahun 2011. Selanjutnya perekonomian Sumsel tumbuh pada tahun 2012 sebesar 6,83%. Namun ditahun selanjutnya terjadi perlambatan perekonomian sebesar 5,3% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 ekonomi semakin melemah yaitu sebesar 4,7%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2011-2014 dapat dilihat gambar 1.2.

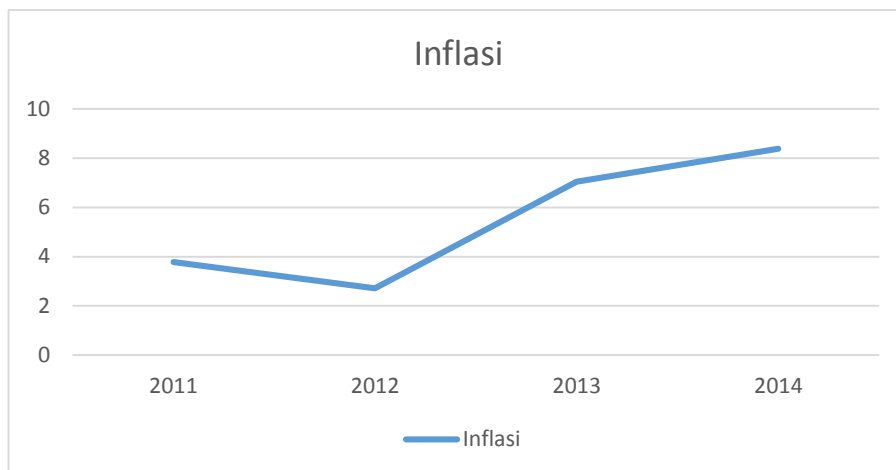


Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel

**Gambar 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tahun 2011-2014**

Adanya perbedaan kondisi dimana penerimaan PPN terus mengalami kenaikan, tetapi disisi lain pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Namun, pada saat yang bersamaan taraf hidup layak masyarakat di Sumsel terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengalami kenaikan pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2011 IPM sebesar 65,12% kemudian meningkat menjadi 65,79% di tahun 2012. Tahun 2013 IPM terus mengalami peningkatan menjadi 66,16% selanjutnya pada tahun 2014 IPM sama kin meningkat menjadi 66,75%.

Faktor-faktor ekonomi seperti Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah digunakan pemerintah sebagai asumsi dasar dalam menetapkan APBN. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa tercermin dari tingkat inflasi, sedangkan kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain dapat dilihat dari nilai tukar. Inflasi sangat penting dijaga dan dikendalikan dalam pengelolaan ekonomi. Tingkat inflasi di Sumsel sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.3.



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel

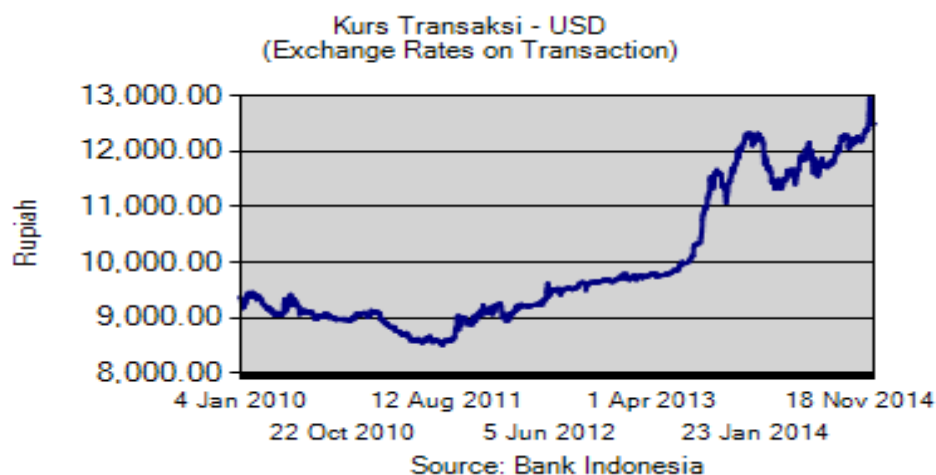
**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2011-2014**

Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Sumsel tahun 2011 berada pada level 3,74% lalu inflasi melemah pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,08%. Tahun 2013 inflasi sebesar 7,04%. Selanjutnya pada tahun 2014 inflasi di provinsi Sumsel menyentuh angka 8,48%.

Pergerakan tingkat inflasi perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada seluruh sektor usaha. Dampak inflasi yang tinggi juga akan berimbas pada gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Nilai rupiah menjadi turun, akibat naiknya permintaan masyarakat terhadap dollar.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi sepanjang tahun 2010 dengan kecenderungan menguat. Secara tahunan, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil pada kisaran Rp 9.087 per dollar AS. Setelah bergerak relatif stabil sepanjang tahun 2010 penguatan berlanjut hingga tahun 2011. Penguatan rupiah didorong meningkatnya arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik, hal ini menyebabkan rupiah berada pada kisaran Rp 8.779 per dollar AS.

Sejak akhir tahun 2011 hingga tahun 2014 nilai tukar rupiah cenderung melemah. Sepanjang tahun 2012 rupiah berada pada kisaran Rp 9.384 per dollar AS. Sementara itu pada tahun 2013 rupiah berada pada kisaran Rp 10.460 per dollar AS. Tahun 2014 rupiah semakin melemah menjadi Rp 12.440 per dollar AS.



**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2010-2014**

Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini bertujuan agar dapat menguntungkan tidak hanya dari sisi ekonomi makro namun juga dari sisi mikro bagi kepentingan seluruh masyarakat. Jika perkembangan ekonomi global berlangsung dengan baik, maka akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai negara yang sedang giat melakukan pembangunan, Indonesia telah menyadari bahwa pajak adalah faktor utama pendapatan negara. Terus meningkatnya penerimaan perpajakan di Sumsel menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kondisi ekonomi dari segi pendapatan. Hal ini menjadi pemikiran karena disisi lain Tingkat Inflasi cenderung meningkat dan diiringi oleh Nilai Tukar Rupiah yang melemah.

Dilatarbelakangi oleh uraian pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Sumsel”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah tingkat inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan permasalahan ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis hanya membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan pajak pertambahan nilai tahun serta tingkat inflasi, dan perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun 2011-2014.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan maksud mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari tingkat inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari tingkat inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian Laporan Akhir ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, kemudian sebagai penambah pengetahuan tentang variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan juga dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya.

## **1.5 Metodologi Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Metode Pengumpulan Data**

Terdapat beberapa metode pengumpulan data, menurut Sanusi (2011:105), pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

#### **1. Cara Survei**

Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka disebut wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuisisioner. Berkaitan dengan itu, cara survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara dan kuisisioner.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telpon.
- b. Kuisisioner, pengumpulan data tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuisisioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

#### **2. Cara Observasi**

Cara observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku.

#### **3. Cara Dokumentasi**

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya biasanya telah tersedia di lokasi. Penyusun tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan cara observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan bahan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan telaah kepustakaan dengan

cara membaca buku sebagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diamati guna mendapatkan teori-teori sebagai bahan analisis yang tersedia.

### **1.5.2 Sumber Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas maka diperlukan sumber data yang valid sesuai dengan penggolongan sumber data. Pengelompokan sumber data menurut Arikunto (dalam Dewata. 2015:31), yaitu :

1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh / dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya.
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang didapat / dikumpulkan dari semua sumber yang sudah ada.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menggunakan data berupa :

1. Data primer yaitu Laporan Penerimaan Pajak di Sumsel periode tahun 2011-2014.
2. Data Sekunder yaitu Laporan Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel dan Laporan Statistik Bank Indonesia periode tahun 2011-2014.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas, setiap bab memiliki hubungan satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan laporan akhir ini secara singkat yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulisan mengemukakan dasar, serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.



## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulisan akan mengemukakan teori-teori dan literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah yang meliputi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, serta mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data yang diperlukan dalam melakukan pengujian. Penelitian ini meliputi identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data yang dilakukan dengan penelitian pengujian hipotesis.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini adalah bab terakhir yang mana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, serta saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.